

# The Role Of The Community And Village Empowerment Office Of West Sumatra Province In Increasing The Capacity Of BUMnag Management

## Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMnag

Bonavidiawati Zebua<sup>1a</sup> Rizki Syafri<sup>2b(\*)</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

[bonavidiawati09@gmail.com](mailto:bonavidiawati09@gmail.com)

[rizkisyafri@fis.unp.ac.id](mailto:rizkisyafri@fis.unp.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[rizkisyafri@fis.unp.ac.id](mailto:rizkisyafri@fis.unp.ac.id)

**How to Cite:** Bonavidiawati Zebua. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMnag. doi: 10.36526/js.v3i2.3355

### Abstract

Received : 11-10-2023

Revised : 25-11-2023

Accepted : 20-12-2023

### Keywords:

Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Desa,  
Peningkatan Kapasitas,  
Pengurus BUMnag

This research aims to determine role West Sumatra Province Community and Village Empowerment Service in increasing the capacity administrators of village/Nagari-owned enterprises. This research was conducted using qualitative approach with descriptive methods. The results research concluded role Department of Empowerment and Community and Villages West Sumatra Province was to provide guidance and guidance to BUM Desa/Nagari. The activities carried out by PMD Service include carrying out coaching, technical guidance, socialization, data collection, supervision and monitoring in terms coaching for Village/Nagari BUMs as well as means of collaboration with third parties in supporting the development of Village/Nagari BUMs. Collaboration with 3rd parties The PMD Department collaborates with universities, for Village/Nagari BUM administrators who wish to continue their educational studies, campus will provide a 30% discount on tuition fees at Taman Siswa University and 25% at Darma Andalas University. There internship/KKN activities in cooperative studies at the Village/Nagari BUM office. In collaboration with Bank Nagari, there will be outreach to the directors of BUM Desa/Nagari regarding the provision of BUM Desa/Nagari business capital credit loans by Bank Nagari. Apart from that, the PMD Service also carries out assessments and appreciation in form of prizes for the best Village/Nagari BUMs every year as encouragement and motivation for Village/Nagari BUMs in West Sumatra. In increasing the capacity of Village/Nagari BUM administrators, there several obstacles or barriers to the PMD Service, including: lack of budget, so that the PMD Service limited in providing guidance and monitoring for Village/Nagari BUMs.

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia yang terdapat di desa juga harus diakui oleh pemerintah (Rauf, 2017). Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Timotius, 2018). Desa merupakan sekumpulan dari masyarakat yang terdapat di suatu wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengurus serta mengatur berdasarkan norma atau aturan yang ada di wilayah

tersebut (Tamam, 2023). Ada berbagai macam desa yang terdapat di Indonesia, di wilayah Sumatera Barat sebutan bagi desa adalah Nagari (Rahayu et al., 2022)

BUMNag atau dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Nagari merupakan salah satu lembaga yang bertujuan dalam memperkuat perekonomian nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari dan juga masyarakat. Hal mendasar yang dipergunakan oleh BUMNag adalah potensi sumber daya dan berbagai macam kebutuhan lainnya (Fadli, 2022). Selain itu, pengelolaan yang dilakukan oleh BUMNag sendiri didasarkan oleh kegiatan ekonomi yang berlandaskan akuntabel, transparansi, partisipatif, dan kerjasama (Destuliadi, 2022). Kemudian pengelolaan dari BUMnag sendiri juga melibatkan dari masyarakat langsung yang dikontrol oleh pemerintah nagari (Maghfira, 2020).

Permasalahan berdasarkan kajian beberapa literature memaparkan bahwa penghasilan secara finansial ataupun ekonomi yang berum berjalan dengan lancar (Dewi, 2022). Selain itu, terdapat juga Bumng yang sudah menjalankan suatu usahanya, akan tetapi memiliki kelemahan dalam bidang pengelolaan usaha yang dimilikinya (Irmawaty et al., 2021). Menurut sumber data ditahun 2019 memaparkan bahwa terdapat 289 unit yang sudah berkembang dari 869 unit yang terdapat di Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2022 jumlah Nagari di Sumatera Barat terjadi peningkatan begitu juga dengan BUMNAG.

Berikut adalah Tabel 1 yang memaparkan terkait klasifikasi BUMDES/BUMNAG yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1. Klasifikasi BUMDES/BUMNAG di Provinsi Sumatera Barat**

No.	Nama	JUMLAH		JUMLAH BUMNAG			KLASIFIKASI		
		Kec	Nagari	Terbentuk	Belum	Maju	Berkembang	Pemula	Perintis
1	Pesisir Selatan	5	182	182	0	9	6	45	22
2	Solok	4	74	72	2	1	0	9	62
3	Sijunjung	8	62	61	1	0	17	16	18
4	Tanah Datar	4	75	72	3	0	2	6	34
5	Padang Pariaman	7	103	95	8	6	0	1	58
6	Agam	6	82	79	3	6	0	26	47
7	Lima Puluh Kota	3	79	71	8	0	0	9	42
8	Pasaman	2	37	37	0	0	3	5	29
9	Kepulauan Mentawai	0	43	41	2	0	0	5	36
10	Dharmasraya	1	52	52	0	5	9	6	12
11	Solok Selatan	7	39	38	1	2	20	0	16
12	Pasaman Barat	11	19	19	0	1	0	5	3
13	Kota Sawahlunto	4	27	23	4	0	0	9	4
14	Kota Pariaman	4	55	50	5	0	1	25	24
<b>Total</b>		<b>56</b>	<b>929</b>	<b>892</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>407</b>

Berdasarkan tabel di atas jumlah BUMNag yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 892 BUMNAG dari 929 Nagari yang ada di Sumatera Barat. Jadi masih terdapat 37 Nagari

yang belum memiliki BUMNag. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengklasifikasikan BUMNag menjadi empat kategori yaitu maju, berkembang, pemula dan perintis. Dari 892 BUMNag terdapat 40 Nagari yang masuk dalam klasifikasi maju.

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan Pegawai di DPMD Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui di BUMNag: tidak paham sistem perekrutan pengurus BUMNag, Tidak paham tujuan pendirian BUMNag, Belum mengetahui potensi yang ada di nagarinya, belum paham mengenai marketing, dan kurangnya gaji pengurus. Sehingga, pengurus sering berganti-ganti karena kurangnya minat masyarakat yang mau menjadi pengurus dan kurangnya pengetahuan. Hal tersebut senada dengan pendapat Bambang (2017) yang memaparkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pendirian Bumdes, diantaranya adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai, pemetaan potensi desa belum dilakukan, dan menyertaan modal dari desa juga belum dilakukan.

Penelitian terdahulu oleh Rahayu et al. (2022) mengemukakan saat ini masih banyak BUMNag di Sumatera Barat yang masih belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar BUMNag masih belum melakukan pencatatan atau perencanaan keuangan dengan baik, bahkan masih ada BUMNag yang sama sekali belum melakukan perencanaan dan juga pencatatan akuntansi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan pengelola BUMNag terkait dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengelola BUMNag melalui pelatihan dan pendampingan.

Kemudian kegiatan wawancara juga dilakukan terhadap Bapak Ferdiansyah Selaku Sekretaris Nagari Painan Selatan. Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dapat dilihat bahwa masih ada BUMNag yang fakum dan Peran DPMD dalam melakukan pembinaan masih belum optimal, dan diperlukannya pembinaan yang berkelanjutan terhadap pengurus BUMNag dalam pengelolaan BUMNag. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan terkait pemerintah kota ataupun kabupaten sebaiknya dapat menjadi garda terdepan.

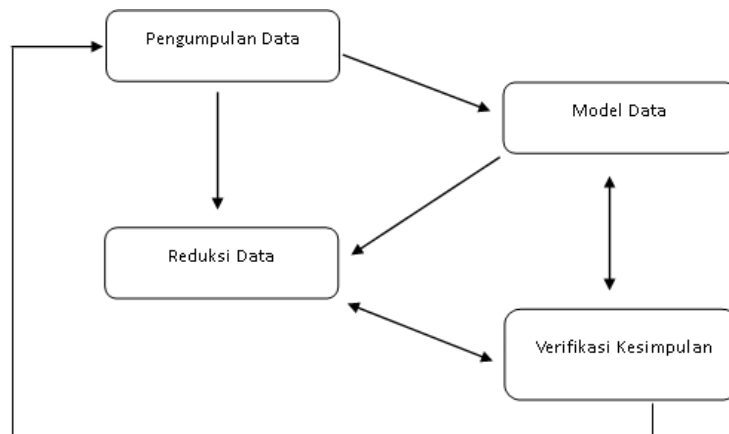
Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumnag". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan Kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Nagari.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Povinsi Sumatera Barat, yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 13 Khatib Sulaiman Padang-25136, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada penelitian ini juga dilakukan terkait penelusuran data melalui informan penelian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari beberapa informan dan data sekunder yang didapatkan dari telaah beberapa sumber pendukung untuk menunjang atau mendukung hasil temuan yang terdapat di data primer. Pada analisis yang dilakukan di data sekunder ini dilakukan terhadap beberapa laporan, jurnal, artikel, buku, dan berbagai macam sumber relevan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Setelah data didapatkan kemudian dilakukan uji keabsahan data yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kemudian teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berikut adalah Gambar 1 yang memaparkan terkait teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam (Diyati & Muhyadi, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Data utama dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan cara peneliti mendatangi secara langsung ke tempat informan bekerja. Hasil yang peneliti dapatkan melalui wawancara selanjutnya direkam dan dituangkan seluruhnya dalam bentuk transkrip (lampiran) yang datanya berhubungan dengan tujuan penelitian yang akan peneliti sajikan pada paparan temuan khusus berikut. Dasar dari Dinas PMD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDES diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMDES pada pasal 112 dan pasal 114.

#### 1. Peran Dinas PMD dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUM Desa/Nagari

Hasil wawancara yang dilakukan pada Asmarul, S.H. selaku Kadus DPMD memaparkan:

“...Dinas PMD sebagai badan Pembina mendorong badan usaha milik nagari untuk kreatif melihat peluang-peluang yang ada di nagari untuk dijadikan sumber ekonomi, bisa dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peluang unit usaha berupa aset. Dan Dinas PMD memiliki peran melakukan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Desa/Nagari.” (Wawancara 30 Oktober 2023).

Hal yang sama juga berkaitan dengan pernyataan tersebut disampaikan oleh Ruji Aprilus Aljassri, SH selaku kepala seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, mengungkapkan bahwa :

“...Kegiatan-kegiatan yang dialukan oleh Dinas PMD umumnya pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan kerja sama dengan pihak ke 3” (Wawancara 30 Oktober 2023).

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2017 memaparkan ada beberapa fungsi dari PMD, diantaranya terkait dengan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan.
- b. Melaksanakan koordinasi langsung.
- c. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknik.

Kemudian beberapa tupoksi yang dimaksudkan, diantaranya:

- a. Saat pemimpin memberikan tugas berkaitan dengan kedinasan, maka sebaiknya harus segera dilakukan.
- b. Kegiatan koordinasi bersama dengan unit kerja harus segera dilaksanakan.

- c. Kegiatan evaluasi serta pelaporan dilaksanakan.
- d. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan koordinasi bersama dengan masyarakat nagari melalui berbagai macam program.
- e. Pemanfaatan Sarjana ke Nagari dilaksanakan rekrutmen.
- f. Pelaksanaan dari pengelolaan data.
- g. Pelaksanaan teknik evaluasi, monitoring, dan pembinaan tentang BUMDes/BUMNag.
- h. Memfasilitasi serta pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan BUMDes/BUMNag.
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi terkait pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
- j. Dll.

Hal ini juga di dukung dengan berbagai kegiatan-kegiatan atau program Dinas PMD seperti yang diungkapkan oleh Mahdianur, SE, MM

"...Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD provinsi Sumatera Barat melalui Bidang UEM KM, terutama melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kewirausahaan Desa/Nagari, dan juga mendukung program imigran menciptakan 100.000 enterpreneur Desa/Nagari sesumatera barat. Kemudian melakukan penentuan-penentuan program seperti Bimtek, dan juga berkaitan dengan rapat koordinasi tingkat provinsi. Selain itu, kita juga melakukan kunjungan lapangan dan juga pendampingan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi Darma Andalas dan Taman Siswa dan terakhir kita juga kerja sama dengan P3PD berkaitan dengan kewirusahaan desa dan pengembangan BUM Desa/Nagari". (Wawancara 30 Oktober 2023).

Saat ini kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PMD terkait peningkatan kapasitas pengurus BUMDes/Nagari seperti yang disampaikan oleh Rujii Aprilus Aljassri, SH selaku kepala seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, antara lain:

"...Sosialisasi PP Nomor 11 tahun 2021 pada tanggal 21-23 januari 2023, Rakor Peningkatan Kapasitas Pengurus BUM Desa/Nagari 6-8 Maret 2023, Rakor BUM Desa/Nagari 15-16 Mei 2023. Materi-materi yang disampaikan terkait, penyusunan laporan keuangan, Mapping Bisnis dalam hal pendataan potensi nagari, pengenalan jenis usaha yang bisa digeluti oleh BUM Desa/Nagari, Penginputan Jenis kode Usaha BUM Desa/ Nagari ke Nomor Induk Usaha N.IB oleh DPMTSP Provinsi Sumatera Barat." (Wawancara 30 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas PMD mendukung kegiatan pembinaan terhadap BUM Desa/Nagari terlihat dari berbagai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD Yaitu melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis sosialisasi, pendataan, pengawasan dan monitoring dalam hal pembinaan terhadap BUM Desa/Nagari serta sarana kerja sama dengan pihak ke 3 dalam pendukung perkembangan BUM Desa/Nagari. Namun kegiatan sosialisasi dan rakor tersebut belum optimal seperti yang disampaikan oleh Masneli, S.Pi selaku Sekretaris Nagari Sungai Pua:

"...Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PMD masih kurang dan dapat dihitung jari. Apalagi saat ini pengurus BUMNag Sungai PUA masih pengurus yang baru jadi perlu mengikuti pelatihan, pembukuannya masih belajar otodidak. Jadi diperlukan adanya pelatihan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang idealnya, dan strategi pengembangan usaha. Nagari dianjurkan untuk mendirikan BUM Nagari tapi sudah berdiri masih kurang dipantau masih banyak yang kurang paham dalam pengelolaan Usaha." (Wawancara 26 Oktober 2023)

Selanjutnya di sampaikan oleh Ibu Dea Olviola, SH selaku Bendahara BUM Nagari Sungai Pua;

"...Untuk pelaporan hanya sekedar seremonial saja, tidak ada feedback atau tanggapan terkait laporan yang sudah dibuat." (Wawancara 26 Oktober 2023)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Riri Syafrianti, S.Pd Selaku Sekretaris Desa Kampung Apar;

“...Saat ini BUM Desa di Kampung Apar sudah fakum dikarenakan pengurus BUM Desa memundurkan diri. Disebabkan pengurus belum bisa mengelola BUM Desa. Pengurus sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas PMD mungin sekali setahun. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan pengurus BUM Desa masih belum baik.”

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan masih belum optimal. Dimana pembinaan masih belum tercapai dapat terlihat dari pengurus BUM Nagari sungai Pua yang masih belajar otodidak terkait pembuatan laporan keuangan. Adanya laporan kegiatan BUM Nagari yang tidak di evaluasi. Kemudian, masih belum optimalnya pengurus BUM Desa/Nagari mengikuti pembinaan.

Selain itu Dinas PMD juga melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 dan kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa/Nagari, seperti yang disampaikan oleh Ruji Aprilus Aljassri, SH selaku kepala seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, sebagai berikut:

“...Dinas PMD melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, bagi pengurus BUM Desa/Nagari yang ingin melanjutkan studi pendidikan, kampus kampus akan memberikan diskon uang kuliah 30% di Universitas Taman Siswa dan 25% di Universitas Darma Andalas. Adanya kegiatan magang/KKN dalam studi kooperatif di kantor BUM Desa/Nagari. Kerja sama dengan Bank Nagari, akan diadakannya sosialisasi kepada direktur BUM Desa/Nagari tentang disediakannya peminjaman kredit modal usaha BUM Desa/Nagari oleh Bank Nagari. Selain itu, Dinas PMD juga melakukan penilaian dan apresiasi berupa hadiah bagi BUM Desa/Nagari terbaik setiap tahunnya sebagai pendorong dan motivasi bagi BUM Desa/Nagari di Sumatera Barat yang tahun ini telah dilaksanakan pada Juni-Agustus 2023.” (Wawancara 30 Oktober 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan dalam pembinaan BUM Desa/Nagari sudah ada kerja sama Dinas PMD dengan perguruan tinggi yang mendukung peningkatan kapasitas pengurus BUM Nagari. Namun berdasarkan observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti masih banyak pemerintah nagari atau pengurus BUM Desa/Nagari yang belum mengetahui dan mengikutinya.

## 2. Kendala-Kendala yang dihadapi

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa/Nagari ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Desrianto Boy yang merupakan salah satu pegawai di Dinas PMD, mengungkapkan bahwa:

“...Kendala atau hambatan yang ditemui di BUM Desa/Nagari Umumnya Direktur BUM Desa/Nagari yang sudah dipilih tidak melalui seleksi tingkat Desa/Nagari, Direktur tidak memiliki jiwa enterpreneur, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha, direktur tidak mempunyai kemampuan atau (kompetensi) dalam menganalisa SDA yang ada di Desa/Nagarinya yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUM Desa/nagari, adanya direktur dengan kemampuan yang kurang (Background pendidikan yang rendah) tidak bisa membaca dan melihat permasalahan yang ada di Desa/Nagari yang bisa dijadikan peluang usaha dari BUM Desa/Nagari. Jadi, ketika Dinas PMD melakukan pelatihan atau pembinaan kepada pengurus BUM Desa/Nagari, materinya kurang sampai atau kurang dipahami oleh pengurus BUM Desa/Nagari.” (Wawancara 30 Oktober 2023)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ruji Aprilus Aljassri, SH selaku kepala seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, mengatakan bahwa:

“...penyebab kemampuan pengurus BUM Desa/Nagari, juga diakibatkan pemilihan pengurus yang harusnya dipisahkan dari politik pemerintah nagari, masih belum adanya konsekuensi

kepada pengurus BUM Desa/Nagari jika tidak tercapainya target atau bahkan merugi". (Wawancara 30 Oktober 2023)

Meskipun demikian, pembinaan sangat diperlukan oleh pengurus BUMNag dan pembinaan tersebut mestinya berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan hasil wawancara dengan Ferdiansyah Sekretaris Nagari Painan selatan yang mengungkapkan bahwa:

"...Saat ini, BUMNag di Nagari Painan Selatan masih fakum sejak 2020. Pengurus yang sebelumnya sudah mengikuti sekitar 5 kali pembinaan baik dari DPMD Provinsi atau kabupaten, bahkan pernah mengikuti studi Ke Jakarta untuk menjadi desa percontohan. Namun pada akhirnya banyak pengurus yang memundurkan diri karena modal BUMNag habis. Pada tahun 2022 sudah dipilih pengurus baru namun masih belum mengikuti pembinaan atau pelatihan dalam pengelolaan BUMNag." (Wawancara 23 Oktober 2023)

Selanjutnya wawancara dengan Zahrizal, ST selaku sekretaris nagari Kasang, menyampaikan bahwa:

"...BUM Nagari Kasang saat ini masih fakum dikarenakan kurangnya kemampuan dari pengurus BUMNag dan kurangnya jiwa wirausaha sehingga kegiatan yang sebelumnya merugi dan sekarang tidak berjalan. Jadi harapannya Dinas PMD memberikan pembinaan kepada pengurus BUM Nagari, dan memberikan kekuatan moril untuk pengurus BUM Nagari untuk mengembangkan usaha". (Wawancara 27 Oktober 2023)

Dari wawancara tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan pengurus BUMNag juga berkaitan mulai dari proses perekrutan pengurus BUMNag. Serta diperlukan kesadaran dari berbagai pihak baik dari pemerintahan Nagari dalam pemilihan pengurus BUM Nagari, pengurus yang dipilih terus semangat dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan usaha BUM Nagari serta perlunya dukungan dari pihak pemerintahan daerah.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Amasrul, SH selaku Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat:

"...Perlunya keseriusan dari Supra-supra desa dan OPD dan komitmen pemerintahan desa untuk memberikan semangat kepada pengurus BUM Desa/Nagari, dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Misalnya dukungan melalui hilirisasi dari pemerintah daerah terhadap usaha-usaha di Nagari." (Wawancara 30 Oktober 2023)

Selanjutnya wawancara dengan Mahdianur selaku Kabid UEM, SDA dan TTG juga menambahkan:

"...hambatan yang dihadapi karena kurangnya keseriusan pemerintahan nagari, terbatasnya SDM untuk mengelola BUM Nagari, dan kurangnya kemampuan pengurus mengidentifikasi jenis usaha atau peluang yang ada, dan kurangnya kemampuan menjual produk."

Selanjutnya Wawan Putra, S.E selaku Direktur BUM Nagari Sungai Pua juga menambahkan :

"... Dinas PMD pernah mengutus pihaknya langsung yang diwakili oleh pihak kecamatan menyampaikan permohonan maaf karena kurangnya perhatian. Kemudian kami menyampaikan keluhan yang kami hadapi dan Dinas PMD menyurati wali nagari agar BUM Nagari menjadi objek perhatian kedepannya."

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas pengurus BUM Nagari mulai dari pemilihan pengurus BUM Nagari dan kurangnya kemampuan pengurus BUM Nagari. Serta kurangnya keseriusan dari organisasi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan BUM Nagari.

Selain hal tersebut di atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengembangan BUM Nagari di Sumatera barat berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PMD antara lain:

**Tabel 3. BUM Desa/Nagari Se-Sumatera Barat yang sudah tercatat di Pusat**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah BUM Desa/Nagari
1	Kab. Pesisir Selatan	38
2	Kab. Solok	62
3	Kab. Sijunjung	27
4	Kab. Tanah Datar	53
5	Kab. Padang Pariaman	75
6	Kab. Agam	72
7	Kab. Lima Puluh Kota	65
8	Kab. Pasaman	34
9	Kab. Kepulauan Mentawai	27
10	Kab. Dharmasraya	41
11	Kab. Solok Selatan	31
12	Kab. Pasaman Barat	19
13	Kota Sawahlunto	15
14	Kota Pariaman	47
Total		606

Sumber: Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah BUM Desa/Nagari Sesumatera Barat yang sudah tercatat sebenarnya 606 BUM Desa/Nagari sedangkan yang sudah tercatat di Dinas PMD tahun 2022 ada 892 BUM Desa/Nagari yang sudah berdiri dari 929 Desa/Nagari Sesumatera Barat jadi ada 286 BUM Desa/Nagari yang masih belum terdaftar di pusat. Ditambah di tahun 2023 ada 107 Nagari baru pemekaran yang belum berdiri atau tercatat BUM Nagarnya.

Disampaikan oleh Ruji Aprilus Aljassri, SH selaku kepala seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD, bahwa:

“BUM Desa/Nagari yang belum terinput itu diakibatkan kelalaian tenaga pendamping profesional kabupaten/kota dalam membimbing aparatur pemerintahan nagari untuk menginput data BUM Desa/Nagari ke [www.sid.kemendes.go.id](http://www.sid.kemendes.go.id) . Sehingga diperlukannya koordinasi dengan Dinas PMD tingkat Kabupaten/Kota. Defisit anggaran dinas juga menyebabkan terbatasnya kegiatan monitoring dalam hal pembinaan BUM Desa/Nagari.” (Wawancara 30 Oktober 2023)

Dari Pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kurang sinkronnya informasi yang ada di Dinas PMD Provinsi yang dikumpulkan melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota dengan hasil yang sudah terdaftar di Kemendes. Terkait hal tersebut juga terlihat masih kurangnya koordinasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas PMD tingkat Kabupaten/Kota.

### **Pembahasan**

Badan Usaha Milik Nagari adalah sebuah lembaga yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui adanya kontribusi langsung dengan sumber pendapatan masyarakat yang bergerak ataupun beroperasi di lembaga ekonomi desa. Penanggulangan permasalahan yang terdapat di desa merupakan salah satu tugas dari BUMNag



dengan mengimplementasikan cara yang kecil terlebih dahulu, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Hal tersebut sangat penting dilakukan dikarenakan terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara masyarakat kota dengan masyarakat nagari (Hasan, 2022). Dengan demikian, Peran Dinas PMD merupakan kaki tangan pemerintah daerah dalam mendukung dan membina BUM Desa/Nagari agar lebih berkembang.

Selanjutnya peningkatan kapasitas ialah strategi yang dilakukan dalam menghadapi tuntutan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam setiap reformasi institusional dibutuhkan komponen esensial yang disebut sebagai Pembangunan kapasitas. Berikut adalah jenis-jenis dari Pembangunan kapasitas menurut Alwi (2019), yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Individu

Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan pada aspek ini di antaranya meliputi etika, kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas individu ini telah dilakukan oleh Dinas PMD. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD yaitu melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis sosialisasi, pendataan, pengawasan dan monitoring dalam hal pembinaan terhadap BUM Desa/Nagari serta sarana kerja sama dengan pihak ke 3 dalam mendukung perkembangan BUM Desa/Nagari.

Dinas PMD melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, bagi pengurus BUM Desa/Nagari yang ingin melanjutkan studi pendidikan, kampus kampus akan memberikan diskon uang kuliah 30% di Universitas Taman Siswa dan 25% di Universitas Darma Andalas. Program kegiatan ini sebagai pendorong peningkatan kapasitas Pengurus BUM Desa/Nagari dalam melanjutkan studi.

Dalam penerapan kapasitas individu ini masih belum maksimal dimana diklat atau pembinaan yang dilakukan masih bisa di hitung jari dan bahkan tidak semua pengurus BUM Desa/Nagari mengikuti Pembinaan. Pemberian upah/gaji juga perlu dipertimbangkan agar pengurus BUM Desa/Nagari terjamin kehidupannya, dan terkait system rekrutmen untuk pengurus BUM Desa/Nagari biar lebih optimal perlu juga pendampingan dari Dinas PMD.

Berikut adalah beberapa instrument yang digunakan dalam kapasitas individu diantaranya:

1. Minat

Beberapa poin yang termasuk dalam minat ini, diantaranya etika, norma, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan orientasi tindakan.

2. Kemampuan

Aspek yang mencakup kemampuan diantaranya adalah pembelajaran, komunikasi, penanganan konflik, pengendalian, evaluasi, pengorganisasian, penggerak, perencanaan, komunikasi, pengambilan Keputusan, dan manajemen.

3. Pengetahuan

Pengetahuan disini meliputi pengetahuan diri, metode dan konsep administrasi, organisasi dan pekerjaan, serta pengetahuan teknik dan umum.

Berdasarkan alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas individu, pengurus BUM Desa/Nagari sebagai sasaran masih belum optimal. Saat ini masih banyak kepengurusan BUM Desa/Nagari yang fakum karena kurangnya etika, norma, tanggung jawab, kepercayaan diri, minat, pembelajaran, komunikasi, penanganan konflik, pengendalian, evaluasi, pengorganisasian, penggerak, perencanaan, komunikasi, pengambilan Keputusan, dan manajemen bagi pengurus banyak kepengurusan BUM Desa/Nagari tidak mencapai target bahkan merugi dan pengurus BUM Desa/Nagari memundurkan diri. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa, peningkatan kapasitas individu sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan BUM Desa/Nagari, pelaksanaan pembinaan bagi pengurus BUM Desa /Nagari mestinya berkelanjutan dan tetap diawasi.

b. Peningkatan Kapasitas Organisasi

Ada berbagai macam aspek dari kapasitas organisasi diantaranya adalah pengambilan Keputusan, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya. Proses pengembangan pada aspek ini dilakukan melalui pengembangan terhadap jaringan organisasi, sumber daya, sistem manajemen, sistem kepemimpinan, dan aturan main dalam sebuah organisasi. Selain itu beberapa kapasitas yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah jaringan organisasi yang ada, pengaturan sarana dan prasarana, prosedur dan mekanisme kerja, proses pengambilan Keputusan, dan struktur organisasi.

Dalam pengembangan Kapasitas organisasi pengurus BUMNag Dinas PMD sebagai badan Pembina tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak diantaranya pemerintah, pemerintah daerah dan Dinas PMD tingkat kabupaten/kota. Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat berupaya mendorong pemerintah Nagari untuk mendirikan dan mendukung kegiatan BUMNAG termasuk dalam anggaran. Selain itu untuk mendukung anggaran kegiatan BUMNag Dinas PMD sudah menjalin kerjasama dengan Bank Nagari, dengan diadakannya sosialisasi kepada direktur BUMNAG tentang disediakannya peminjaman kredit modal usaha BUMNAG oleh Bank Nagari untuk mendukung anggaran program BUMNAG. Untuk mendorong dan memotivasi BUM Desa/Nagari agar lebih baik Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian berupa lomba BUM Desa/Nagari terbaik sesumatera barat setiap tahunnya.

c. Peningkatan Kapasitas Sistem

Kapasitas disini yang dimaksudkan mencakup beberapa kebijakan ataupun pengaturan terkait pencapaian obyektivitas. Berikut dipaparkan terkait tujuan peningkatan pada poin ini, diantaranya:

1. Sistem, organisasi, dan individu mengindikasikan dalam bentuk pembelajaran.
2. Responsifitas, aktivitas sinkronisasi antara kemampuan dan kebutuhan.
3. Efektivitas, kepastian demi mencapai hasil yang diinginkan.
4. Efisiensi, memiliki keterhubungan dengan sumber daya dan waktu yang berguna dalam mencapai *outcome*.

Dalam peningkatan kapasitas sistem Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat membuat regulasi atau aturan dalam pembuatan laporan keuangan BUM Desa/Nagari. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Nagari Sungai Pua, Pengurus BUMNag di Nagari Sungai Pua masih belum paham dengan pembukuan laporan keuangan yang ideal, harapannya dinas PMD dapat memberikan aturan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan. Namun, saat wawancara dengan pegawai Dinas PMD bagian Seksi PEM Dinas PMD sudah melukan BIMTEK, Sosialisasi dan Rakor pengurus BUMNAG salah satu materinya mengenai penyusunan laporan keuangan, Mapping Bisnis dalam hal pendataan potensi nagari, dan pengenalan jenis usaha yang bisa digeluti oleh BUM Desa/Nagari.

Peran Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dalam Peningkatan kapasitas pengurus BUMNAG dalam peningkatan kapasitas sistem mengacu pada usaha Dinas PMD untuk mengembangkan Kapasitas pengurus dalam pengelolaan BUMNag sudah dilaksanakan oleh dinas PMD melalui pelatihan dan bimbingan teknis namun dalam pendampingan masih belum optimal. Dimana masih banyak BUMNag yang belum berhasil menjalankan BUMNag dan banyak program BUMNag yang tidak berjalan.

## PENUTUP

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai badan Pembina melakukan bimbingan dan pembinaan kepada BUM Desa/Nagari belum optimal. Seusai dengan jenis-jenis peningkatan kapasitas yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kapasitas sistem. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD Yaitu melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis sosialisasi, pendataan, pengawasan dan monitoring

dalam hal pembinaan terhadap BUM Desa/Nagari serta sarana kerja sama dengan pihak ke 3 dalam pendukung perkembangan BUM Desa/Nagari. Kerja sama dengan pihak ke 3 Dinas PMD melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, bagi pengurus BUM Desa/Nagari yang ingin melanjutkan studi pendidikan, kampus kampus akan memberikan diskon uang kuliah 30% di Universitas Taman Siswa dan 25% di Universitas Darma Andalas. Adanya kegiatan magang/KKN dalam studi kooperatif di kantor BUM Desa/Nagari. Kerja sama dengan Bank Nagari, akan diadakannya sosialisasi kepada direktur BUM Desa/Nagari tentang disediakannya peminjaman kredit modal usaha BUM Desa/Nagari oleh Bank Nagari. Selain itu, Dinas PMD juga melakukan penilaian dan apresiasi berupa hadiah bagi BUM Desa/Nagari terbaik setiap tahunnya sebagai pendorong dan motivasi bagi BUM Desa/Nagari di Sumatera Barat. Dalam peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa/Nagari ada beberapa kendala atau hambatan Dinas PMD antara lain: kurangnya anggaran, sehingga Dinas PMD terbatas dalam melakukan Pembinaan dan monitoring BUM Desa/ Nagari. Perlunya keseriusan dari berbagai pihak dalam mendukung kegiatan BUM Desa/Nagari baik dari pemerintah Desa/Nagari, pemerintahan daerah dan masyarakat. Perlunya perhatian dari Pemerintahan Nagari dalam memilih pengurus BUM Desa/Nagari dan juga komitmen dari pengurus BUM Desa/Nagari yang terpilih.

Saran ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu (1) Dinas PMD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar lebih optimal pembinaan dilakukan dengan berkelanjutan dan diawasi secara berkala. Dimana pembinaan yang telah dilakukan masih belum berhasil dilihat dari banyak BUM Desa/Nagari yang sekarang tidak berjalan lagi dan fakum, belum berhasil bahkan merugi. Setiap program dari Dinas PMD lebih disosialisasikan lagi agar sampai ke pemerintah Nagari dan pengurus BUM Desa/Nagari; (2) Pemerintah Desa/Nagari dalam pemilihan pengurus harus dipisahkan dari politik, pengurus yang dipilih harus melalui seleksi tingkat Desa/nagari dengan memperhatikan komitmen dan kemampuan dari calon pengurus; (3) Perlunya komitmen dari pengurus BUM Desa/Nagari untuk bersungguh-sungguh dalam mengelola BUM Desa/Nagari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, S. H. (2019). *Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Patani Takalar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Destuliadi. (2022). Asistensi Legalitas Badan Hukum sebagai Upaya Penguatan Rencana Strategis BUM Nag Duo Baleh Suku dalam Pengembangan Usaha. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.5547> ASISTENSI
- Dewi, D. S. (2022). *Peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya)*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28–43. <https://doi.org/10.21831/amp.v2i1.2407>
- Fadli, R. (2022). *Eksistensi Bumnag Tampuniek Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar*. Institute Agama Islam Negeru Batusangkar.
- Irmawaty, I., Hamdani, M., Surapto, D., Riana, K. E., & Iriani, F. (2021). Pelatihan Administrasi Dan Keuangan Bumdes Makmur Anugerah Lestari Kota Ciomas Bogor – Jawa Barat. *Prosiding SENAPENMAS*, 171. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.14985>
- Maghfira, S. (2020). Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Studi Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh). *Riaw Law Journal*, 4(2), 147–162.
- Rahayu, R., Roza, H., Edmawati, S. D., & Karib, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan

- Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan : Studi Pada BUMNAg di Sumatera Barat ( Capacity Building for Village-Owned Enterprises in Financial Management : a Study on BUMNAg in West Sumatra ). *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi (JPE)*, 1(1), 7–13.
- Rauf, M. (2017). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(2), 413–429.
- Tamam, B. (2023). Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia. *Proceedings*, 109–124.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>